

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
2013**



**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK
HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
PASCAPANEN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR

Sebagai instrumen yang dapat meningkatkan komitmen penyelenggara Negara yang bersih, maka di susunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pertanggungjawaban secara periodik dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Dasar hukum pembuatan LAKIP sebagai pertanggungjawaban instansi secara periodik adalah :

1. UU No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN.
3. Instruksi Presiden No. 7 Th. 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan & RB Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permenpan & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 459/kpts/OT.210/8/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan.

Laporan AKIP ini berisi tentang kinerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2013. Laporan ini juga sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada masyarakat (*Public Accountability*) tentang pencapaian hasil kinerja Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan.

Laporan AKIP ini dibuat sebagai terobosan dalam sistem administrasi pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang demokratis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Atas dukungan dari semua pihak laporan ini bisa selesai sesuai dengan berakhirnya tahun anggaran dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa segala saran dan kritik untuk dapat memperbaiki dan menyempurnakan penulisan laporan ini sangat diharapkan.

Bogor, Januari 2014

**Kepala Balai Pengujian Mutu
dan Sertifikasi Produk Hewan**

Drh. Rr. Endang Ekowati
NIP. 19620916 199403 2 001

IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan harapan masyarakat bagi terselenggaranya *Good Governance*. Laporan ini menggambarkan penjelasan tentang realisasi kegiatan-kegiatan dan hasil pelaksanaan dengan rencana, keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang telah ditetapkan.

Pada laporan ini dapat dilihat langkah-langkah yang diwujudkan oleh Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan dalam akuntabilitas kinerja selama 1 (Satu) tahun meliputi :

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kegiatan merupakan perwujudan dari Strategi dan Prioritas yang dipersiapkan oleh unit kerja dalam suatu keterkaitan yang jelas antara kegiatan yang direncanakan dengan strategi yang dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

2. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki. Perjanjian kinerja antara Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun anggaran.

3. Perjanjian Kinerja ini harus dilaporkan pencapaiannya pada setiap triwulan. Hasil capaian Kinerja Balai secara umum sangat baik, 4 indikator kegiatan tercapai lebih dari atau sama dengan 100 %, namun demikian penyerapan anggaran masih belum optimal dilakukan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	5
C. Organisasi dan Tata Kerja	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
A. PERENCANAAN KINERJA.....	17
1. Visi dan Misi	17
2. Tujuan dan Sasaran	18
3. Kebijakan	19
4. Program	19
5. Kegiatan	20
B. PERJANJIAN KINERJA.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Sasaran	18
B. Program	18
C. Kegiatan	18
D. Capaian Kinerja Kegiatan	19
1. Pengujian Mutu Produk Peternakan.....	23
2. Bimbingan Teknis Laboratorium Daerah.....	40
3. Pengembangan Teknis dan Metode Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Produk Peternakan.....	41
4. Sertifikasi Pengujian Mutu Produk Peternakan.....	42
5. Penyerapan Anggaran.....	43

E. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan.....	44
F. Strategi Pemecahan Masalah.....	46
BAB IV. PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Pegawai BPMSPH pada tahun 2013.....	9
Tabel 2. Keadaan Pegawai BPMSPH berdasarkan Status dan Tingkat Golongan pada tahun 2013.....	13
Tabel 3. Keadaan Pegawai BPMSPH berdasarkan Status dan Tingkat Pendidikan pada tahun 2013.....	13
Tabel 4. Data Keuangan yang dikelola BPMSPH pada tahun anggaran 2013.....	14
Tabel 5. Capaian Kinerja BPMSPH Tahun 2013.....	23
Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Sampel BPMSPH tahun 2013	24
Tabel 7. Rincian Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Sampel Tahun 2013.....	24
Tabel 8. Rekapitulasi Jumlah sampel Monitoring dan Surveilans (Sampel Aktif) Tahun 2013.....	26
Tabel 9. Data Pelaksanaan Bimbingan Teknis Laboratorium Daerah.Th. 2013.....	40
Tabel 10. Realisasi Keuangan yang dikelola BPMSPH pada Tahun Anggaran 2013.....	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Hasil Monitoring Residu Antibiotik Tahun 2013.....	27
Grafik 2. Hasil Pengujian Residu Antibiotik Tahun 2013.....	30
Grafik 3. Prevalensi Resistensi Antimikroba terhadap Isolat <i>Salmonella</i>	31
Grafik 4. Prevalensi Resistensi Antimikroba terhadap Isolat <i>E.Coli</i>	32
Grafik 5. Prevalensi Cemaran Mikroba pada Pangan Asal Hewan.....	33
Grafik 6. Hasil Monitoring <i>Salmonella enteritidis</i>	34
Grafik 7. Hasil Monitoring Residu Hormon.....	35
Grafik 8. Hasil Monitoring Aflatoxin pada Susu Segar T.A 2013	37
Grafik 9. Hasil Monitoring Pewarna Sudan pada Telur T.A.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi untuk kelangsungan kehidupan dan menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Pemenuhan kebutuhan pangan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan baik jumlah maupun kualitasnya. Khususnya pangan asal hewan seperti daging, susu dan telur merupakan sumber protein hewani yang kebutuhannya terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya nilai gizi bagi tubuh.

Meskipun demikian, keamanan bahan pangan asal hewan perlu diperhatikan karena dapat membawa penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan atau mengandung sisa residu obat yang digunakan pada ternak serta dapat juga tercemar oleh mikroba dan atau senyawa kimia yang dapat membahayakan manusia yang mengkonsumsinya. Pangan asal hewan juga bersifat mudah rusak (*perishable food*) dan membusuk sehingga perlu diperlakukan penanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan baik dan benar untuk menghindari kerusakan dan kontaminasi. Selain itu, karena bahan pangan asal hewan mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, maka pada akhir-akhir ini banyak terjadi kasus penyimpangan produk asal hewan terhadap peraturan perundangan yang berlaku seperti pemalsuan daging, penggunaan bahan kimia berbahaya (formalin, boraks), bahan

pewarna, dan lain-lain yang semuanya itu dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pasal 58 ayat (1) bahwa Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan, disamping itu Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalam pasal 59 bahwa produk hewan yang akan diedarkan dan dalam peredaran dilakukan pemeriksaan dan pengujian; serta dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis negara penerima/pengimport untuk penerbitan sertifikat veteriner harus dilengkapi dengan sertifikat hasil pemeriksaan dan pengujian; sebagaimana dalam pasal 55 ayat (2). Salah satu usaha untuk melindungi konsumen dan menjaga keamanan dan mutu produk pangan asal hewan, maka pemerintah melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (Direktorat Kesmavet dan Pascapanen) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada saat ini telah mempunyai Laboratorium yang melakukan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan dengan wilayah kerja seluruh Indonesia yaitu Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). Dalam rangka mendukung berbagai kebijakan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, salah satunya adalah Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K) Tahun 2014 dan Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

(ASUH). Dalam pelaksanaannya, kebijakan dan strategi melalui pengawasan keamanan dan mutu pada seluruh aspek keamanan pangan mulai dari sarana, prasarana dan fasilitas produksi, cara beternak (*Good Farming Practices*), SDM, cara panen atau pematangan hewan serta penanganan, pengolahan dan distribusi produk. Dengan kebijakan dan strategi ini diharapkan semua produk asal hewan baik produksi dalam negeri maupun luar negeri terjamin keamanan, mutu serta kehalalannya.

Sesuai tugas fungsi, BPMSPH dalam mendukung keberhasilan PSDS/K 2014 dan Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH, BPMSPH melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan melalui Program Monitoring Surveilans Residu dan Cemarkan Mikroba (PMSR-CM).

Permintaan pelayanan pemeriksaan dan pengujian mutu produk hewan terus meningkat baik jumlah sampel maupun jenis pengujian yang diperlukan, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan pengguna jasa terhadap keamanan dan mutu produk hewan yang dikonsumsi.

Dengan meningkatnya kebutuhan pengujian yang sangat cepat menyebabkan kegiatan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi produk hewan di BPMSPH perlu ditingkatkan untuk memenuhi target sesuai permintaan sehingga dapat memuaskan para pelanggan pengguna jasa pengujian baik dari perusahaan, institusi pemerintah dan masyarakat perseorangan. Disamping itu, juga sebagai salah satu usaha untuk terlaksananya program monitoring dan surveilans Residu dan Cemarkan

Mikroba sehingga akan mendukung tercapainya target program produk hewan yang ASUH.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan berdirinya Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan antara lain : (1) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani peternak melalui peningkatan nilai tambah; (2) meningkatkan Devisa bagi Negara dengan bertambahnya ekspor produk bahan asal hewan; (3) berkembangnya kegiatan berupa aktivitas-aktivitas pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan jasa-jasa; (4) tumbuhnya industri-industri peternakan di pedesaan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja; (5) berkembangnya investasi dipedesaan khususnya peternakan; (6) meningkatnya gizi masyarakat dengan mengkonsumsi hasil produk peternakan (bahan makanan asal hewan) dan (7) terhindarnya masyarakat dari bahaya adanya residu dan cemaran mikroba sebagai akibat mengkonsumsi bahan makanan asal hewan yang mengandung residu dan cemaran mikroba. seperti : (a) reaksi hipersensitifitas; (b) takhikardia dan tremor; (c) terratogenik; (d) karsinogenik; (e) efek mutagenik; (f) resistensi dari mikroorganisme; (g) keracunan; dan (h) diare; (8) memberikan rasa ketentraman bathin masyarakat dengan teridentifikasinya daging yang tercampur dengan daging yang tidak halal.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.459/Kpts/OT.210/8/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan (BPMPP) mempunyai tugas melaksanakan

pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan. Pada tanggal 24 Mei 2013 terdapat perubahan nama balai berikut penambahan tugas pokok dan fungsinya, yakni dikeluarkannya Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi produk Hewan (BPMSPH).

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Tugas pokok BPMSPH adalah melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMSPH menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan
2. Pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan
4. Penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan
5. Pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan
6. Pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan

7. Pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikat unit usaha produk hewan
8. Pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikasi unit usaha produk hewan;
9. Pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan
10. Pelaksanaan kajian resiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
11. Pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
12. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan
13. Pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner
14. Penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
15. Pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
16. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPMSPH

C. ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Susunan Organisasi

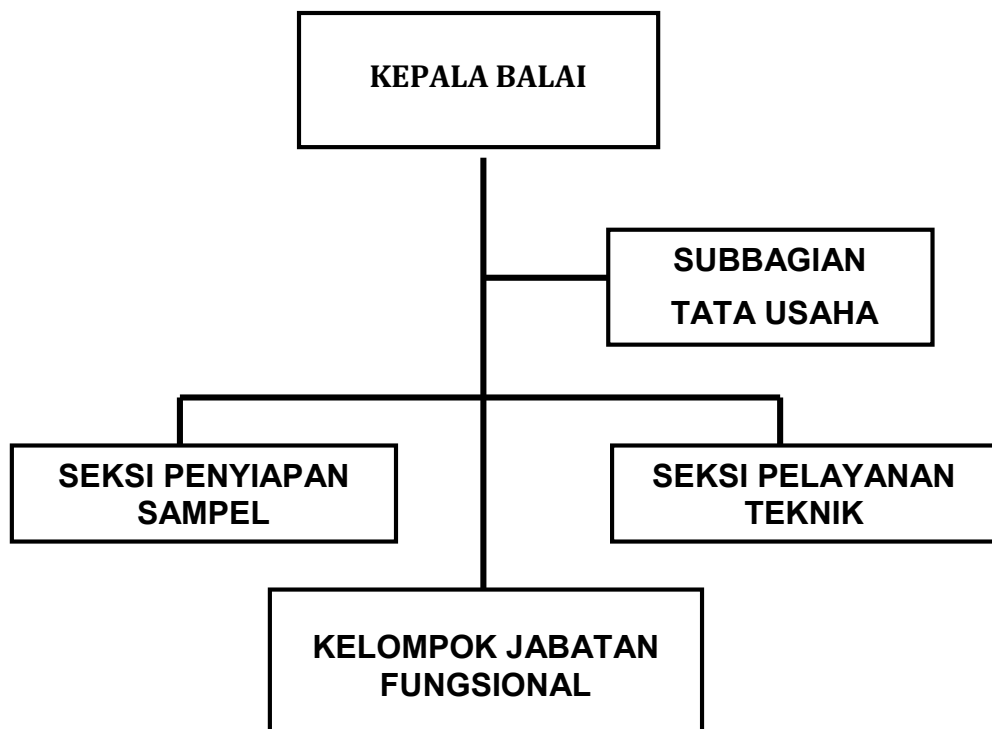
Berdasarkan Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi produk Hewan (BPMSPH). mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala balai
2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Penyiapan Sampel
4. Seksi Pelayanan Teknik
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan dapat dilihat pada gambar bagan dibawah ini:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**



2. Tata Kerja

Menurut organisasi dan tata kerja dan Sertifikasi produk Hewan (BPMSPH), Kepala Balai dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dilingkungan Kementerian Pertanian

serta dengan instansi lain diluar Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas masing-masing.

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumahtangga dan perlengkapan. Seksi penyiapan sampel mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan, pengemasan, pelabelan, pendistribusian, dokumentasi hasil uji dan pengamanan sampel produk hewan. Seksi pelayanan teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Fungsional Paramedik Veteriner dan jabatan fungsional lainnya yang melakukan tkegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kerja dilingkungan BPMSPH disusun dengan mengacu pada Struktur Organisasi yang tercantum pada Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013.

Susunan Pegawai dan tugas pada unit kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Tabel 1. Data Pegawai Balai BPMSPH Tahun 2013 .

NO.	NAMA / NIP	UNIT KERJA	JABATAN / TUGAS	PANGKAT / GOL.
1	2	3	4	5
1.	Drh. Rr. Endang Ekowati NIP. 19620916 199403 2 001	BPMSPH	Kepala Balai	Pembina Tk.I, IV/b
2.	Drh. Suparno, MM, MP NIP. 19570831 198603 1 001	BPMSPH	TKDH	Pembina Tk I, IV/b
3.	Drh. Rr. Anik Winanningrum NIP. 19751221 200801 2 012	Tata Usaha	Kepala Sub Bag Tata usaha	Penata , III/c
4.	Drh. Hastuti Kunci Rahayu NIP.19661223 199303 2 007	Tata Usaha	Urusan Perencanaan	Pembina, IV/a
5.	Dadang Gani NIP. 19600515 198703 1 001	Tata Usaha	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda Tingkat I, III/b
6.	Rusnaedi NIP. 19650708 199003 1 013	Tata Usaha	Urusan Perlengkapan	Penata Muda Tingkat I, III/b
7.	Ahmad Holik NIP. 19660319 199903 1 001	Tata Usaha	Urusan keuangan	Pengatur Tk I , II/d
8.	Muhamad Iqbal NIP. 19790615 200003 1 003	Tata Usaha	Bendahara Penerimaan	Pengatur Tk I , II/d
9.	Asep Saepudin NIP. 19671205 20003 1 001	Tata Usaha	Driver	Pengatur Tk I , II/d
10.	Elah Sriheryanti, A.Md NIP. 19740611 200604 2 025	Tata Usaha	Urusan surat menyurat	Pengatur Tk I , II/d
11.	Eni Nuraeni NIP. 19741214 200604 2 008	Tata Usaha	Urusan Laporan Hasil Uji	Pengatur Muda , II/b
12.	Muhammad Iqbal Zein NIP. 19781017 200710 1 001	Tata Usaha	Driver	Pengatur Muda, II/b
13.	Abdul Rohmat NIP. 19770310 200710 1 001	Tata Usaha	Resepsionis	Pengatur Muda, II/b
14.	Erwin Yusuf Ekaputra NIP. 19710506 200812 1 001	Tata Usaha	Pranata Komputer	Pengatur Muda, II/a
15.	Dedi NIP. 19781210 200812 1 002	Tata Usaha	<i>Cleaning Service</i>	Juru Muda, I/a
16.	Kudung Suroso NIP. 19850718 200910 1 001	Tata Usaha	Pengelola Gudang	Pengatur Muda, II/a
17.	Drh. Armin Riandi NIP. 19780730 200312 1 004	Seksi Penyiapan Sampel	Kepala Seksi Penyiapan Sampel	Penata, III/c

18.	Drh. Agus Triana Wijatagati NIP. 19720801 200501 1 001	Seksi Penyiapan Sampel	Medik Veteriner Pertama	Penata, III/c
19.	Zeze Zakiah NIP. 19801115 200701 2 001	Seksi Penyiapan Sampel	PMHP Pelaksana	Pengatur, II/c
20.	A. Chahyaningtyas P., NIP. 19780902 200812 2 001	Seksi Penyiapan Sampel	PMHP Pelaksana Pemula	Pengatur Muda, II/a
21.	Drh. Nuraini Triwijayanti NIP.19790921 200501 2 001	Seksi Pelayanan Teknik	Kepala Seksi Pelayanan Teknik	Penata, III/c
22.	Komarudin NIP. 19630928 198703 1 002	Seksi Pelayanan Teknik	Paramedik Veterinar Plks. Lanjutan	Penata Tk.I, III/d
23.	Drh. Fevi Yani NIP.19770215 200501 2 001	Seksi Pelayanan Teknik	Medik Veteriner Muda	Penata, III/d
24.	DR. Drh.Puji Rahayu NIP. 19770403 20050 2 002	Seksi Pelayanan Teknik	Medik Veteriner Pertama	Penata, III/c
25.	Drh. Oli Susanti NIP. 19730911 200604 2 001	Seksi Pelayanan Teknik	Medik Veteriner Muda	Penata, III/c
26.	Drh. Eko Susanto NIP. 19771028 200604 1 001	Seksi Pelayanan Teknik	Medik Veteriner Muda	Penata, III/c
27.	Drh. Ery Novarieta Harsanty NIP. 19751130 200801 2 010	Seksi Pelayanan Teknik	Medik Veteriner Muda	Penata , III/c
28.	Drh. Wiwit Subiyanti NIP 19810221 200801 2 010	Seksi Pelayanan Teknik	Medik Veteriner Muda	Penata, III/c
29.	Riska Desitania, S.Si NIP. 19751203 200003 2 002	Seksi Pelayanan Teknik	Paramedik Veterinar Penyelia	Penata Tk. I, III/d
30.	Drh. Ika Kartika Syarifah NIP. 19820930 200901 2 007	Seksi Pelayanan Teknik	Medik Veteriner Muda	Penata Muda Tk.I, III/b
31.	Drh. Kanti Puji Rahayu NIP. 197709262009122002	Seksi Pelayanan	Medik Veteriner Muda	Penata, III/c

		Teknik		
32.	Dini Tri Mardiani, S.T NIP. 19780324 200312 2 002	Seksi Pelayanan Teknik	PMHPMuda	Penata, III/c
33.	Fitri Amalia,S.Si., M.Si. NIP. 19740228 200003 2 001	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pertama	Penata Muda TK.I, III/b
34.	Sani Susanty, S.Si NIP. 19770107 199903 2 001	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Muda	Penata Muda Tk I, III/b
35.	Atzhar Rezha Siregar,S.Si NIP. 19780802 200501 1 001	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pertama	Penata Muda Tk I, III/b
36.	Vera Kurnia Hilmi, S.Si NIP. 19830207 200604 2 001	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pertama	Penata Muda Tk I, III/b
37.	Andi Surjatna NIP. 19620825 199403 1 001	Seksi Pelayanan Teknik	Paramedik Veterinar Plks. Lanjutan	Penata Muda Tk I, III/b
38.	Nyi Raden Elok KS. S.Si NIP. 19771218 200912 2 001	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pertama	Penata Muda, III/a
39.	Drh. Woro Dyah Pinilih NIP. 19840403 201101 2 017	Seksi Pelayanan Teknik	Calon Medik Veteriner Pertama	Penata Muda TK.I, III/b
40.	Attya Asuh Insani, ST NIP. 19810615 200901 2 005	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pertama	Penata Muda, III/a
41.	Muhammad Iwan Dzulfezar NIP. 19770808 199703 1 001	Seksi Pelayanan Teknik	Paramedik Veterinar Plks.Lanjutan	Penata Muda TK I, III/b
42.	Ading Wahyudi, A.Md NIP. 19790331 200604 1 018	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pelaksana	Penata Muda, III/a
43.	Suri Latudiana NIP. 19690316 199403 2 002	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pelaksana Pemula	Penata Muda, III/a
44.	Elis Damayanti, A. Ma NIP. 19760315 200212 2 001	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pelaksana Lanjutan	Pengatur Tk I , II/d

45.	Metrizal NIP. 19840319 200801 1 003	Seksi Pelayanan Teknik	Paramedik Pelaksana	Penata Muda, III/a
46.	Sutiyastuti NIP. 19630707 200701 2 001	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pelaksana	Pengatur, II/c
47.	Indriyana NIP. 19731116 200701 2 001	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pelaksana	Pengatur, II/c
48.	Rustiadi NIP. 19790815 200812 1 001	Seksi Pelayanan Teknik	PMHP Pelaksana Pemula	Pengatur Muda, II/a
49.	Waci NIP. 19790624 200701 1 001	Seksi Pelayanan Teknik	Calon PMHP Pelaksana Pemula	Pengatur Muda TK I, II/b

3. Ketatausahaan

Kegiatan Administrasi / ketatausahaan dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi kegiatan urusan Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Umum yang terdiri dari kegiatan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Balai. Secara operasional kegiatan administrasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Balai sehingga Sub Bagian Tata Usaha merupakan bagian yang penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Balai secara umum.

4. Kepegawaian

Pada Bulan Juli 2013 terdapat promosi pegawai jabatan structural atas nama Drh. Imron Suandy, yang semula menjabat sebagai Pejabat Fungsional Medik Veteriner, sehingga sejak Bulan Juli sampai dengan Desember 2013 jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang PNS, dan 9 (sembilan) dan 9 (Sembilan) orang berstatus tenaga kontrak, Disamping itu terdapat pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 2 (dua) orang. sKeadaan kepegawaian dan hal lainnya yang menyangkut kepegawaian BPMPP dapat dilihat pada tabel : 2 s/d 8.

Tabel 2. Keadaan pegawai BPMSPH berdasarkan status dan tingkat golongan pada tahun 2013.

No.	Status Kepegawaian	Golongan ruang																	Jml
		I				II				III				IV					
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E	
1.	PNS		1	-	-	4	8	3	5	5	9	10	5	2	1	-	-	-	49
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Kontrak	-	1	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
JUMLAH		1	1	-	-	11	7	4	4	6	12	8	4	1	1	-	-	-	58

Tabel 3. Keadaan Pegawai BPMSPH berdasarkan status dan tingkat pendidikan pada tahun 2013

No.	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian			
		PNS	CPNS	Kontrak	Jumlah
1	Dokter Hewan	15	-	-	15
2	Sarjana	9	-		9
3	D3 Ekonomi	1	-		1
4	D3 Pertanian	1		1	2
5	D3 Medik Veteriner	1			1
6	D2 Higiene Makanan	1			1
7	SAKMA/SMK	1			1
8	SMK-SPP Peternakan	1			1
9	SMK-STM	4		3	7
10	SMK-SMEA	4		1	5
11	SMU	10		3	13
12	SMP			1	1
13	SD	1			1
Jumlah		49	-	9	58

5. Keuangan

Dalam tahun anggaran 2013 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan mendapat alokasi anggaran yang dibagi dalam satu

program yaitu Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (018.06.09) dengan Kegiatan Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (1786), dengan Sub Kegiatan Pengujian Mutu Produk Peternakan (1786.012), Koordinasi Teknis (1786.031), Administrasi Kegiatan dan Ketata Usahaan (1786.032), Fasilitas PNBP (1786.036), Layanan Perkantoran (1786.994), Kendaraan Bermotor (1786.995), Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (1786.996), Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (1786.997) dan Gedung dan Bangunan (1786.998).

Tabel 4. Data Keuangan yang dikelola BPMSPH pada tahun anggaran 2013. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (018.06.09)

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	Kegiatan Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (1786),	15.204.249.000,-

6. Kegiatan Urusan Umum

Tugas dan tanggung jawab urusan umum adalah mencakup kegiatan administrasi kearsipan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan kendaraan dinas.

Pelaksanaan kegiatan administrasi surat-menyurat dicatat dalam buku agenda surat, baik surat keluar maupun surat masuk sesuai dengan petunjuk administrasi kearsipan.

Pelaksanaan kegiatan administrasi barang berdasarkan buku pedoman administrasi barang Kementerian Pertanian dilengkapi oleh buku induk barang, buku/kartu stok barang, kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan dan buku pembantu lainnya.

Pelaksanaan kegiatan administrasi pengelolaan kendaraan dinas ditangani oleh Pool kendaraan yang penggunaannya disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari dalam unit kerja lingkup BPMSPH.

Pelaksanaan kegiatan urusan pemeliharaan bangunan, sarana / prasarana yang ada pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan.

7. Penyiapan Sampel

Kegiatan penyiapan sampel meliputi penerimaan, pencatatan, pengemasan, pelabelan, pendistribusian, serta pengamanan sampel produk hewan. Kegiatan lainnya yaitu membuat rencana kegiatan monitoring dan survailans residu dan cemaran mikroba pada pangan asal hewan dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.

Pengembangan pelayanan yang dilaksanakan terhadap konsumen dan atau pengguna jasa pengujian laboratorium disesuaikan dengan kemampuan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia pada balai.

8. Pelayanan Teknik

Kegiatan pelayanan teknik meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan teknik untuk menunjang pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan dan pengembangan teknik/metode, serta membuat rencana pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyusunan kebutuhan bahan-bahan uji dan peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategik Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan dibuat pada tahun anggaran 2010 yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2014. Rencana strategi BPMSPH ini telah disusun dengan merujuk kepada Renstra Direktorat Kesmavet dan Pascapanen sehingga lebih dititikberatkan kepada pembuatan program-program kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (Direktorat Kesmavet dan Pascapanen).

1. Visi dan Misi

Dalam rangka menentukan arah dan menjalankan peranan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, maka BPMSPH telah menentukan visi dan misinya sebagai berikut:

a. Visi

BPMSPH telah mempunyai visi yang merupakan gambaran tentang suatu keadaan ideal yang diinginkan dimasa yang akan datang dan merupakan suatu harapan masa depan BPMSPH. Visi ini merupakan acuan untuk mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan BPMSPH untuk mewujudkan cita-citanya. Adapun visi BPMSPH adalah “Mewujudkan BPMSPH sebagai lembaga pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan nasional yang handal dan bertaraf internasional”.

b. Misi

Misi BPMSPH menggambarkan tugas utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan mandat yang diberikan. Selain itu misi BPMSPH tidak hanya memperhatikan kepentingan BPMSPH sendiri saja, tetapi harus juga memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

Misi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan dengan menerapkan persyaratan laboratorium yang diakreditasi;
2. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas laboratorium dalam rangka menjamin keabsahan/validitas hasil pengujian dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
3. Melaksanakan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
4. Meningkatkan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
5. Meningkatkan pengembangan teknik dan metode pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan jejaring kerja dengan pelanggan dan *Stakeholders*/lembaga terkait.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh balai dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan uraian di atas, maka Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan telah memformulasikan tujuannya yaitu :

1. Melindungi masyarakat / konsumen produk peternakan (bahan pangan asal hewan) dari bahaya residu dan cemaran mikroba. Sasaran yang akan di capai adalah Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan Pangan Produk Hewan Impor dan domestik yang beredar di wilayah Indonesia.

2. Meningkatkan mutu produk peternakan melalui Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Produk Hewan.

Sasaran yang akan dicapai adalah Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian mutu produk hewan.

3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa untuk mencapai pelayanan prima.

3. Kebijakan

1. Mengembangkan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan.
2. Menerapkan sistem manajemen mutu berkelanjutan.
3. Operasionalisasi BPMSPH dan pedoman pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan yang dilandasi dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang ditetapkan.

4. Program

BPMSPH menyusun program yang mengacu kepada Rencana Strategik Direktorat Kesmavet dan Pascapanen untuk mendukung program-program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kesmavet dan Pasca Panen. Program ini merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (018.06.09).

Program ini juga bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat/ konsumen bahan pangan asal hewan agar mengerti dan memahami tentang bahaya yang ditimbulkan oleh adanya residu dan cemaran di dalam produk peternakan terhadap kesehatan.

5. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini dilakukan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk

Hewan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring dan survailans produk hewan yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.
2. Melaksanakan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan serta peningkatan profesionalisme di bidang pengujian mutu dengan tetap mengacu pada SNI dan Internasional.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Balai (SDM dan Sumber Daya lainnya) secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan kemitraan dengan Pengguna Jasa.
6. Mendorong ketersediaan bahan pangan asal hewan yang ASUH dan layak dikonsumsi.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki. Perjanjian kinerja antara Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun anggaran sebagaimana pada dokumen penetapan kinerja pada Lampiran 1.

Perjanjian Kinerja ini harus dilaporkan pencapaiannya pada setiap triwulan, yaitu triwulan I (B03) yang dilaporkan pada awal Bulan April, triwulan II (B06) yang dilaporkan pada awal Bulan Juli, triwulan III (B09) yang dilaporkan pada awal Bulan Oktober, dan triwulan IV (B12) yang dilaporkan pada awal Bulan Januari Tahun berikutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan/ uraian Akuntabilitas Kinerja ini akan menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi dengan penyajian data hasil pencapaian kinerja. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini juga dapat dilihat tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Balai selama tahun 2013, serta langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menghadapi kendala yang ada.

A. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kerja ini adalah Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan sebanyak 4000 sampel melalui pemeriksaan dan pengujian di Laboratorium BPMSPH selama Tahun 2013 dengan biaya Rp. 15.204.249.000,- bersumber dari anggaran APBN Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

B. Program

Program-program yang telah ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan yaitu Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

C. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam jangka waktu tahun 2013 yang dilakukan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring dan survailans bahan pangan asal hewan yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.

2. Melaksanakan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan serta peningkatan profesionalisme di bidang pengujian mutu dengan tetap mengacu pada SNI dan standar Internasional.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) Balai dan Sumber Daya lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan kemitraan dengan Pengguna Jasa.
6. Mendorong ketersediaan bahan pangan asal hewan yang ASUH dan layak dikonsumsi.

D. Capaian Kinerja Kegiatan

Capain Kinerja kegiatan BPMSPH Tahun Anggaran 2013 sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja BPMSPH Tahun 2013

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Triwulan I (B03)			Capaian Triwulan II (B06)			Capaian Triwulan (B09)			Capaian Triwulan (B12)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengujian Mutu Produk Peternakan	Terlaksananya pengujian mutu produk peternakan	500 sampel	421 sampel	84.20%	1750 sampel	2026 sampel	115.77%	3000 sampel	2838 sampel	94.60%	4000 sampel	4076 Sampel	101.90%
2	Bimbingan Teknis Lab Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis laboratorium daerah	4 Lab	4 Lab	100.00%	10 Lab	12 Lab.	120.00%	15 Lab	16 Lab	106.67%	20 Lab	22 Lab	110.00%
3	Pengembangan teknis dan metoda pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan	Tersedianya pengembangan teknis dan metoda pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan	1 Metode Uji	1 Metode Uji	100.00%	3 Metode Uji	3 Metode Uji	100.00%	4 Metode Uji	4 Metode Uji	100.00%	5 Metode Uji	6 Metode Uji	120.00%
4	Sertifikasi pengujian mutu produk peternakan	Tersedianya sertifikat pengujian mutu produk peternakan	50 sertifikat	55 sertifikat	110.00%	300 Sertifikat	343 sertifikat	114.33%	450 sertifikat	462 sertifikat	102.67%	650 sertifikat	732 sertifikat	112.62%
5	Penyerapan Anggaran	Terserapnya anggaran kegiatan balai sesuai SP2D	25%	6.18%		50%	25.09%		75%	75%		100%	87.32%	87.32%
6	Penyelesaian Kerugian Negara (KN) sebesar Rp. 0,-	Terlaksananya penyelesaian Kerugian Negara	5%	-		100%	100%							

1. Pengujian Mutu Produk Peternakan

Pada Tahun 2013 BPMSPH telah melakukan pengujian terhadap 4076 sampel. Hal ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 101.90%. Namun demikian ada beberapa parameter pengujian yang

jumlah sampelnya (terutama sampel pasif) yang kurang dari target yang diharapkan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6 s.d. 8.

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Sampel BPMSPH tahun 2013.

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Sampel			
		Target Uji		Realisasi	
		Sampel	Sampel Uji	Sampel	Sampel Uji
1	Aktif	1930	6580	2159	6079
2	Pasif	2070	2260	1917	4113
	Total	4000	8840	4076	10192

Tabel 7. Rincian Rekapitulasi Jumlah Penerimaan sampel tahun 2013

No.	Jenis Pengujian	Jumlah Sampel			
		Target Uji		Realisasi	
		Sampel	Sampel Uji	Sampel	Sampel Uji
I	Residu Antibiotik	1450	2700	1546	1725
1	Uji tapis skreening (PS's, TC's, ML's, AG's)				1445
2	Pengujian Residu Sulfa				6
3	Anthelmentik				25
4	Konfirmasi PC's				90
5	Konfirmasi TC's				101
6	Konfirmasi ML's				36
7	Konfirmasi AG's				5
8	Konfirmasi Golongan Sulfa				6
9	Pengujian Residu Chloramphenicol				7
10	Nitrofurantoin				4
II	Cemaran Mikroba	1520	3540	1186	6306
11	TPC				1240
12	<i>E. coli</i>				966
13	<i>F. coliform</i>				1050
14	<i>Salmonella sp.</i>				1107
15	<i>Staphylococcus sp.</i>				1011
16	Khamir				157
17	Kapang				157
18	<i>Clostridium perfringens</i>				323
19	<i>Camphylobacter</i>				112
20	<i>Enterobacteriaceae</i>				6

21	<i>Listeria monocytogenes</i>				16
22	<i>Bacillus cereus</i>				7
23	<i>Clostridium botulinum</i>				6
24	<i>Salmonella enteritidis</i>				148
III	Fisiko Kimia	1030	2600	1344	2099
A	Residu Hormon	230			
25	TBA				275
26	DES				35
27	Zeranol				101
28	MGA				100
B	Residu Bahan Pengawet/Kimia	250			
29	Uji Formalin				431
30	Sudan Red (I, II, III, IV)				87
31	Uji Borax				127
32	Nitrit				20
C	Identifikasi Spesies	250			
33	Identifikasi Spesies				297
34	Identifikasi Spesies dengan PCR				12
D	Aflatoxin	100			144
E	Proksimat	50			
35	Uji Fisik				42
36	Awal Pembusukan				1
37	Kadar Lemak				55
38	Kadar Air				39
39	Kadar Abu				35
40	Kadar Protein				47
41	Total Mineral				6
42	Laktosa				31
43	Konsistensi				2
44	Ph				4
45	Candling				2
46	Tinggi Kantung Hawa				2
47	Indeks Kuning Telur				2
48	Indeks Albumin				2
49	Keasaman (<i>Acidity</i>)				31
50	<i>Insolubility Index</i>				31
F	Residu Logam Berat	150			200
		4000	8840	4076	10192

Tabel 8. Rekapitulasi jumlah sampel Monitoring dan Surveilans (sampel Aktif)
Tahun 2013.

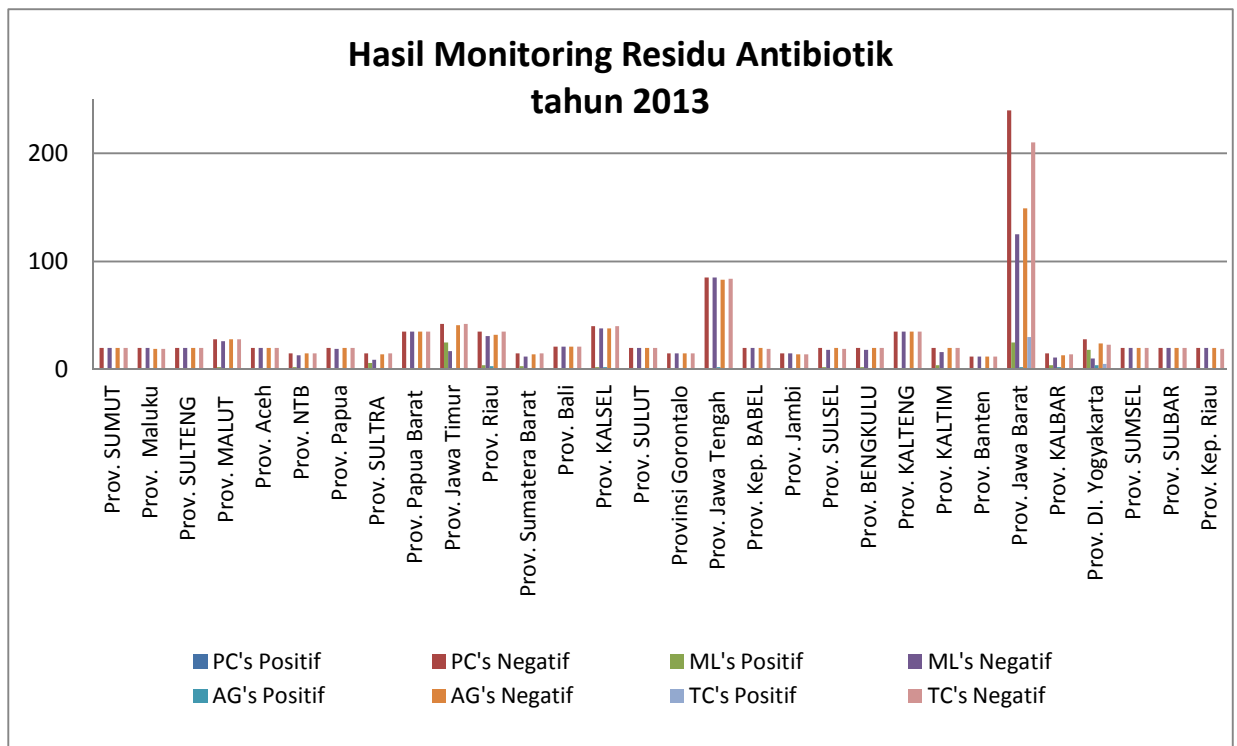
No.	Jenis Pengujian	Jumlah sampel			
		Target Uji		Realisasi	
		Sampel	Sampel uji	Sampe l	Sampel Uji
I.	RESIDU	500	2500	451	1037
1.	Obat Antibiotik/ Non Antibiotik (Gol. PC's, ML's, AG's, TC's)				1012
2.	Anthelmentik				25
II.	Cemaran Mikroba	640	1760	865	3853
1.	TPC				718
2.	<i>E.Coli</i>				718
3.	<i>F.Coliform</i>				718
4.	<i>Salmonella sp</i>				748
5.	<i>Staphylococcus aureus</i>				711
6.	<i>Camphylobacter</i>				100
7.	<i>Salmonella enteritidis</i>				140
III.	KIMIA			841	1183
1.	Hormon TBA Hormon Zeranol Hormon MGA	180	900		177 92 90
2.	Bahan Residu Kimia Berbahaya Formalin Borax Nitrit Sudan red	180	540		130 79 20 86
3.	Identifikasi Spesies	180	180		222
4.	Aflatoxin	100	100		140
5.	Logam Berat	150	600		140
6.	Lainnya			1	7
Total		1930	6580	2157	6073

Hasil pengujian dari sampel tersebut sebagai berikut ;

a. Pengujian Residu Obat

Pengujian Residu dilakukan dengan metode skrining bioassay. Metode ini mendeteksi adanya residu dari 4 golongan antibiotika. Antibiotika ini terdiri dari golongan : Antibiotika Grup Penicillin (PC's), Grup Makrolida (ML's) Grup Aminoglikosida (AG's) dan Grup Tetrasiklina (TC's). Pengujian residu obat dalam rangka monitoring dan Surveilans bahan pangan asal hewan tahun anggaran 2013, target pemeriksaan dan pengujian sampel aktif (monitoring dan surveilans) adalah 500 sampel sedangkan realisasi pemeriksaan dan pengujian sampel monitoring sebanyak 951 sampel yang diambil dari 30 provinsi.

Grafik 1. Hasil Monitoring Residu Antibiotik Tahun 2013

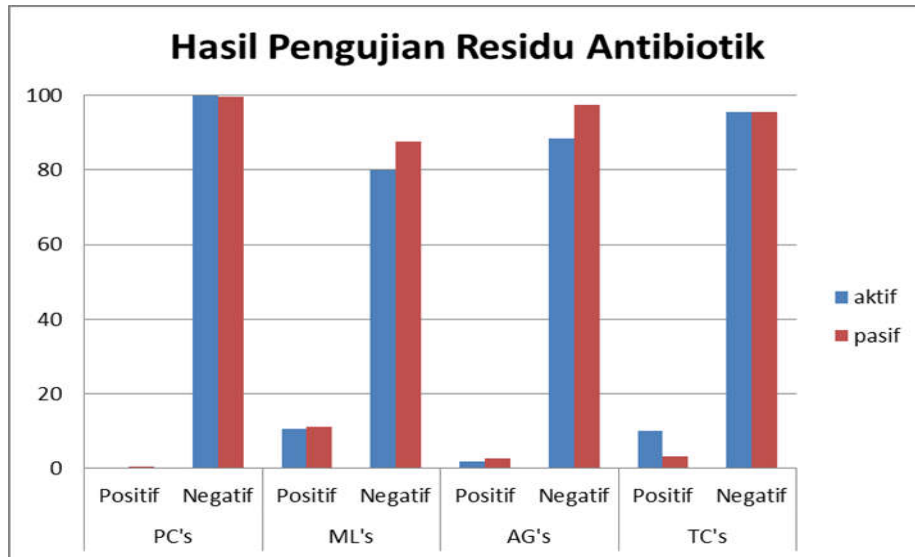


Dari wilayah tersebut dari hasil pengujian ada beberapa tempat yang masih positif mengandung residu obat, tempat tersebut yaitu Provinsi Maluku (1 Sampel Daging Ayam positif mengandung residu golongan aminoglikosida dan 1 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan tetrasiklin), Maluku Utara (2 sampel

daging sapi positif mengandung residu golongan makrolida), Nusa Tenggara Barat (2 Sampel Daging Sapi positif mengandung residu golongan makrolida), Papua (1 Sampel Daging Ayam positif mengandung residu golongan makrolida), Sulawesi Tenggara (6 Sampel Daging Sapi positif mengandung residu golongan makrolida dan 1 sampel daging sapi positif mengandung residu golongan aminoglikosida), Kabupaten Tuban-Jawa Timur (12 sampel susu segar positif mengandung residu golongan makrolida dan 1 sampel susu segar positif mengandung residu golongan aminoglikosida), Propinsi Riau (4 Sampel Daging Sapi positif mengandung residu golongan makrolida dan 3 sampel daging sapi positif mengandung residu golongan aminoglikosida), Kota Payakumbuh (3 Sampel Daging Sapi positif mengandung residu golongan makrolida), Propinsi Jawa Timur (13 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan makrolida), Propinsi Kalimantan Selatan (1 sampel telur ayam positif mengandung residu golongan makrolida, 2 sampel telur ayam positif mengandung residu golongan aminoglikosida dan 1 sampel telur itik positif mengandung residu golongan makrolida), Kabupaten Temanggung (1 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan aminoglikosida dan 1 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan tetrasiklin), Propinsi Bangka Belitung (1 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan tetrasiklin), Propinsi Jambi (1 sampel daging sapi positif mengandung residu golongan aminoglikosida dan 1 sampel daging sapi positif mengandung residu golongan tetrasiklin), Kabupaten Sinjai (2 sampel daging sapi positif mengandung residu golongan makrolida dan 1 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan tetrasiklin), Propinsi Bengkulu (2 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan makrolida), Propinsi Kalimantan Timur (1 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan makrolida dan 3 sampel hati ayam positif mengandung residu golongan makrolida), Kabupaten

Bogor (1 sampel telur ayam positif mengandung residu golongan makrolida, 1 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan aminoglikosida, 1 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan tetrasiklin, 24 susu segar sapi positif mengandung residu golongan makrolida, dan 8 sampel susu segar positif mengandung residu golongan tetrasiklin), Kota Cilegon (daging ayam), Propinsi Kalimantan Barat (1 sampel daging sapi positif mengandung residu golongan makrolida, 3 sampel hati sapi positif mengandung residu golongan makrolida, 2 sampel hati sapi positif mengandung residu golongan aminoglikosida dan 1 sampel hati sapi positif mengandung residu golongan tetrasiklin), Propinsi DI Yogyakarta (2 sampel daging sapi positif mengandung residu golongan makrolida, 5 sampel hati sapi positif mengandung residu golongan makrolida, 4 sampel hati sapi positif mengandung residu golongan aminoglikosida dan 4 sampel hati sapi positif mengandung residu golongan tetrasiklin), Kabupaten Sleman (11 sampel susu segar positif mengandung residu golongan makrolida dan 1 sampel positif mengandung residu golongan tetrasiklin), BP3HK Cikole (1 sampel susu kambing positif mengandung residu golongan tetrasiklin dan 20 susu sapi mengandung residu golongan tetrasiklin), Propinsi Kepulauan Riau (1 sampel daging ayam positif mengandung residu golongan tetrasiklin). Dengan demikian dapat dianalisa ternyata masih banyak ternak yang masih dalam pengobatan tetapi sudah disembelih dan dikonsumsi untuk hal tersebut laporan hasil uji sudah dikirim ke Dinas yang terkait dan Direktur Kesmavet dan Pascapanen untuk segera ditindaklanjuti dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya residu obat dan cara beternak yang baik.

Grafik 2. Hasil Pengujian Residu Antibiotik



Disamping sampel aktif BPMSPH juga menguji sampel pasif dari para customer sebanyak 421 sampel dari sampel pasif (sebagian besar adalah unit usaha skala besar) ini kejadian yang positif tidak terlalu banyak berbeda dengan hasil pengujian dari sampel aktif.

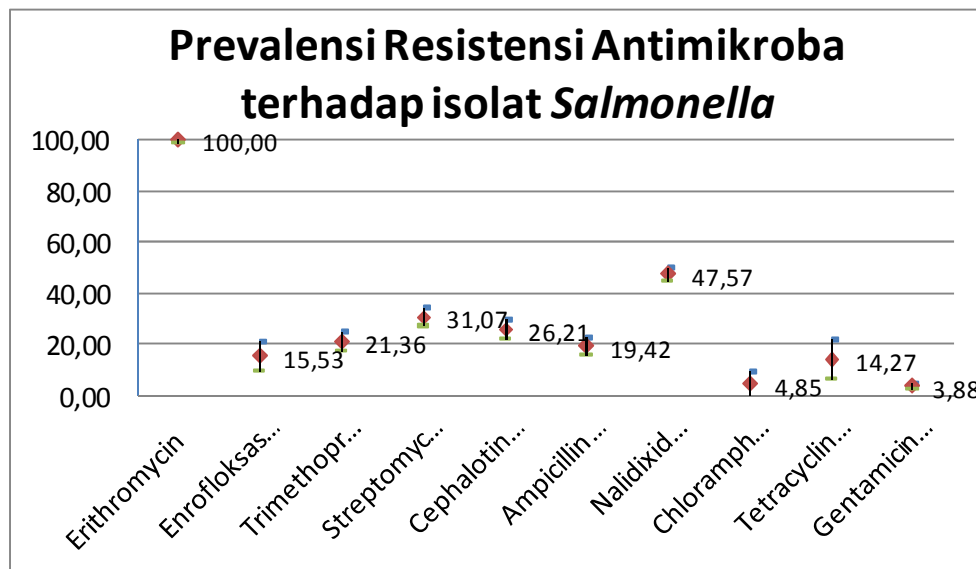
Untuk pengujian residu kuantitatif/konfirmasi BPMSPH menerima 8 sampel konfirmasi residu golongan sulfanamida, 5 sampel konfirmasi residu kloramfenikol, 90 sampel konfirmasi residu golongan penicillin, 11 sampel konfirmasi residu golongan tetrasiklin, 36 sampel konfirmasi residu golongan makrolida, 5 sampel konfirmasi residu golongan aminoglikosida, dan 4 sampel konfirmasi residu golongan sulfa. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa 2 sampel daging sapi dan 1 sampel telur ayam (propinsi Jawa Timur) terdeteksi residu golongan aminoglikosida, 27 sampel susu sapi (propinsi Jawa Timur) dan 1 sampel daging ayam (SHG Farm) terdeteksi residu golongan makrolida, 17 sampel susu sapi (BP3HK Cikole) dan 1 sampel telur ayam (Sekuntum Farm) terdeteksi residu golongan tetrasiklin.

b. Pengujian Resistensi antimikroba

Resistensi Antimikroba (*Antimicrobials Resistance/AMR*), yaitu kemampuan mikroorganisme untuk mencari cara untuk menghindari aksi obat yang dipakai untuk mengobati infeksi. Pemilihan kuman *E.coli* dan *Salmonella* isolat lapang karena bakteri tersebut merupakan bakteri yang paling tinggi menginfeksi manusia, selain itu karena *E.coli* merupakan bakteri komensal yang ada di usus sehingga tingkat kontaminasi pada PAH sangat tinggi.

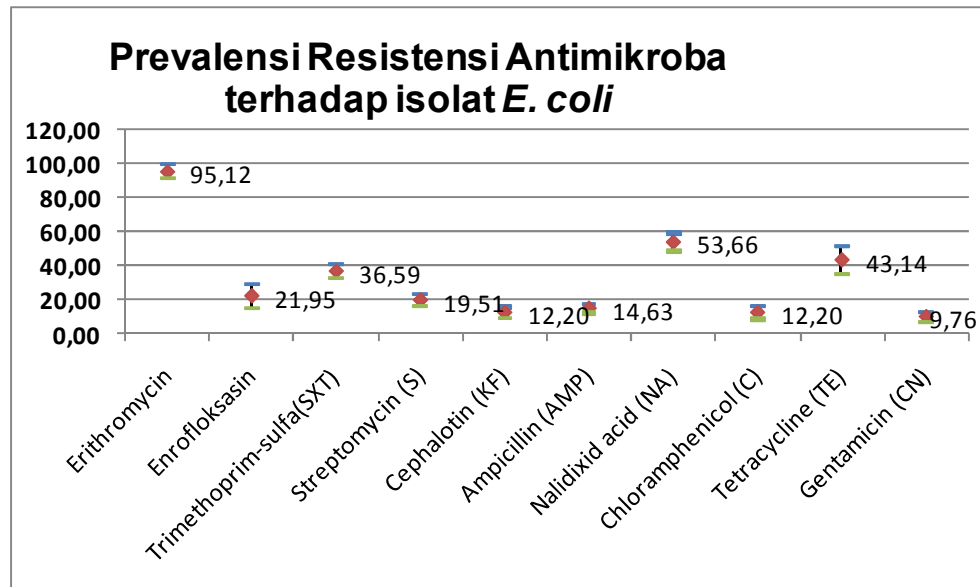
Resistensi antimikroba diuji terhadap 9 kelompok antimikroba yaitu Beta laktam (Ampicilin), Cephalosporin (cephalotin), Aminoglikosida (Gentamicin, Streptomycin), Floroquinolon (Enrofloxacin, Nalidixid acid), Makrolida (Erythromycin), phenikol (Chloramphenicols), Sulfonamide (Trimethrometoprim-sulfamethoxazole), dan Tetrasiklin (Tetrasiklin).

Grafik 3. Prevalensi Resistensi Antimikroba terhadap isolat *Salmonella*



Dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa kuman *E.coli* resisten terhadap antimikroba yaitu 100% resisten terhadap Erythromycin, 14,27% resisten Tetracyclin, 47,57% resisten

terhadap Nalidixid acid, 19,42% resisten terhadap Ampicilin, 15,53% resisten terhadap Enrofloxacin, 21,36% resisten terhadap Trimethoprim-sulfamethoxazole, 31,07% resisten terhadap Streptomycin, 4,85% resisten terhadap Chloramphenicol, 3,88% resisten terhadap Gentamycin dan 26,21% resisten terhadap Cephalotin.



Dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa kuman *E.coli* resisten terhadap antimikroba yaitu 95,12% resisten terhadap Erythromycin, 43,14% resisten Tetracyclin, 53,66% resisten terhadap Nalidixid acid, 12,63% resisten terhadap Ampicilin, 21,95% resisten terhadap Enrofloxacin, 36,59% resisten terhadap Trimethoprim-sulfamethoxazole, 19,52% resisten terhadap Streptomycin, 12,20% resisten terhadap Chloramphenicol, 9,76% resisten terhadap Gentamycin dan 12,20% resisten terhadap Cephalotin.

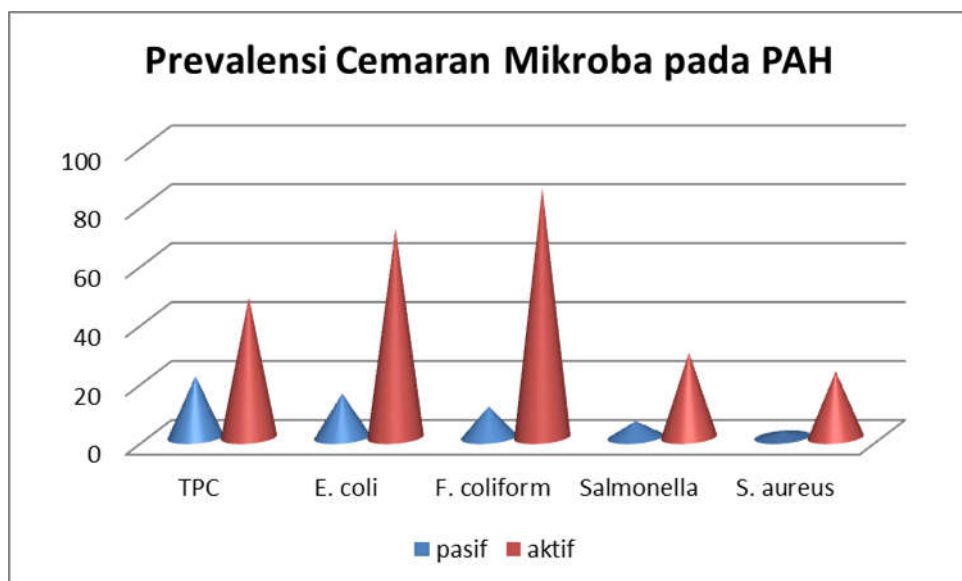
Resistensi Antimikroba Ini menjadi isu kesehatan masyarakat global yang dapat menghambat pengendalian penyakit menular yang semakin banyak. Pengujian resistensi ini berkaitan sangat erat dengan terdeteksinya sejumlah residu antibiotik pada daging. Yang harus menjadi perhatian adalah kecenderungan resistensi kuman

isolat lapang *E.coli* terhadap antimikroba golongan makrolida dan quinolon yang merupakan antimikroba generasi kedua. Pengujian ini menjadi sangat penting dimana penggunaan antimikroba pada PAH dapat menyebabkan resisten terhadap kuman penyebab diare. Karena merupakan masalah kesehatan publik yang terus berkembang dan global. WHO mengingatkan bahwa negara harus siap untuk melaksanakan langkah-langkah pengendalian infeksi rumah sakit untuk membatasi penyebaran obat multi-strain resisten dan untuk memperkuat kebijakan nasional tentang penggunaan yang bijaksana antibiotik, mengurangi generasi bakteri resisten antibiotik.

c. Pengujian Cemaran Mikroba

Target monitoring dan Surveilans Tahun Anggaran 2013 uji cemaran mikroba terhadap bahan pangan asal hewan yang dilakukan 280 sampel (1400 sampel uji) direalisasikan sebesar 673 sampel (3365 sampel uji) yang diambil dari 22 Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota.

Grafik 5. Prevalensi Cemaran Mikroba pada Pangan Asal Hewan (PAH)

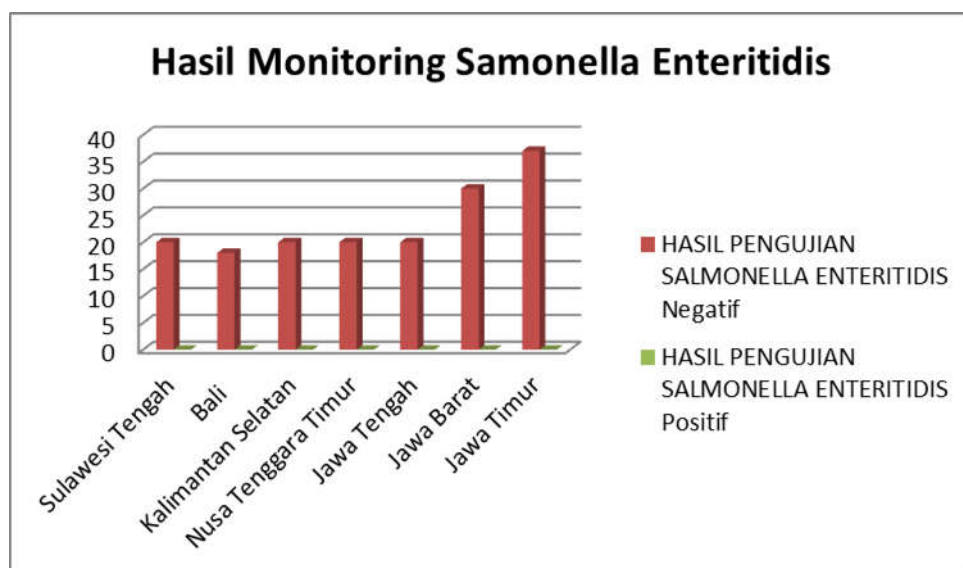


Disamping sampel aktif BPMSPH juga dapat kiriman sampel dari customer/pengguna jasa untuk diuji sebanyak 896 sampel dengan sampel uji sebanyak 3710 yang dilakukan pengujian cemaran mikroba antara lain : TPC, *E.Coli*, *F. Coliform*, *Salmonella sp*, *S. aureus*, Kapang, Khamir, *Clostridium*, *Camphylobacter*, *Enterobacteriae*, *Listeria*, dan *E. sakazakii* Dilihat dari hasilnya ternyata masih banyak produk hewan yang mengandung cemaran mikroba diatas BMCM (Batas Maksimum Cemaran Mikroba) terutama TPC, *E. Coli* dan *F. Coliform*, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan untuk bisa mengeliminir cemaran mikroba tersebut dengan cara menjaga kebersihan lapak (tempat jualnya), personal higyne-nya dan kebersihan lingkungannya.

d. *Salmonella enteritidis*

Pengujian *Salmonella enteritidis* dalam rangka Monitoring dan Survailans terhadap telur dalam tahun anggaran 2013, target pemeriksaan dan pengujian adalah 300 sampel sedangkan realisasi pemeriksaan dan pengujian salmonella enteritidis adalah 167 sampel. Dari hasil pengujian dari 167 sampel tersebut tidak ada sampel yang mengandung kontaminan salmonella enteritidis.

Grafik 6. Hasil Monitoring Samonella Enteritidis.



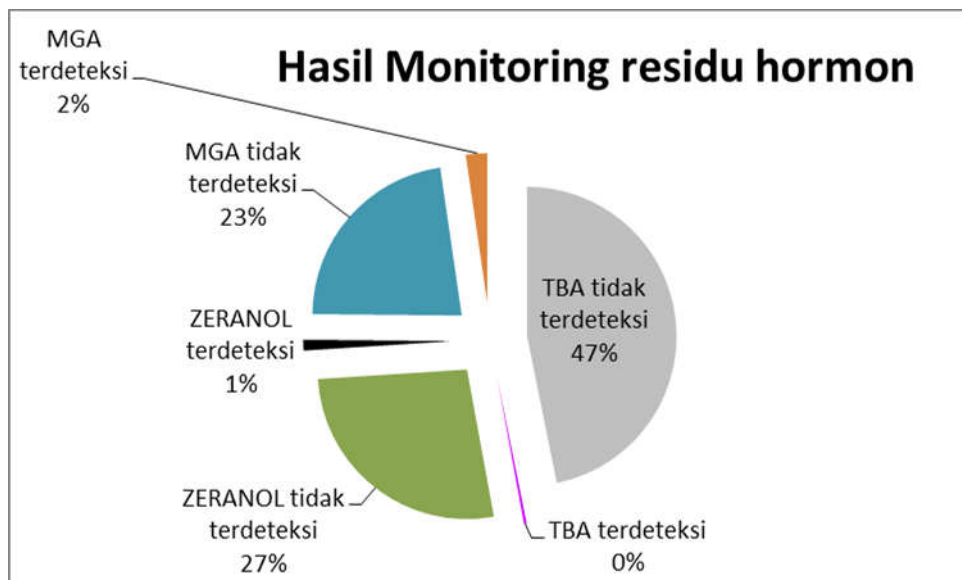
e. *Camphylobacter*

Pengujian campilobacter dalam rangka Monitoring dan Survailans terhadap bahan pangan asal hewan dalam tahun anggaran 2013, target pemeriksaan dan pengujian adalah 100 sampel sedangkan realisasi adalah 100 sampel. Dari hasil pengujian dari 100 sampel tersebut tidak ada sampel yang mengandung kontaminan *camphylobacter*. 18 sampel daging ayam mengandung kontaminan *camphylobacter*.

f. Pengujian Hormon

Pengujian Residu hormon dalam rangka Monitoring dan Survailans terhadap bahan pangan asal hewan tahun anggaran 2013, dari target pemeriksaan dan pengujian adalah 230 sampel dapat direalisasikan sejumlah 281 sampel daging sapi yang diuji kandungan Diethylstilbesterol (DES), Trenboloneacetatnya (TBA), Zeranol, dan MGA yang diambil dari 8 Propinsi dan 6 Kabupaten/Kota oleh staf BPMSPH.

Grafik 7. Hasil Monitoring Residu Hormon



Dari hasil pengujian memang ditemukan 1 sampel hati sapi yang mengandung Hormon Zeranol (Propinsi Lampung), 2 sampel

daging sapi (1 sampel dari Kabupaten Bogor dan 1 sampel dari Dinas Pertanian Kota Metro) mengandung residu hormon MGA. Perlu pemantauan dari daerah pemerintah daerah terkait, indikasi positif ini kemungkinan besar disebabkan oleh Sapi bakalan import yang disembelih sebelum umurnya cukup yaitu minimal 90 hari. Dan sebanyak 142 sampel yang dikirim dari beberapa pengguna jasa/konsumen, diantaranya terdapat 2 sampel serum darah (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung) terdeteksi mengandung hormon TBA. Hasil pengujiannya masih ditemukan produk hewan yang mengandung Hormon Pemacu pertumbuhan tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemangku Kepentingan.

g. Pengujian Formalin

Pengujian residu formalin dalam rangka monitoring dan Surveilans terhadap bahan pangan asal hewan dalam tahun anggaran 2013, target pemeriksaan dan pengujian adalah 250 sampel sedangkan realisasi pemeriksaan dan pengujian residu Formalin adalah 123 sampel yang diambil dari 6 propinsi dan 1 kota/kabupaten. Dari hasil pengujian dari 123 tidak terdapat sampel yang mengandung formalin. Dan ada 303 sampel yang dikirim dari beberapa pengguna jasa/ konsumen BPMSPH yang diuji terhadap bahan pengawet (Formalin). Dari hasil pengujian masih ada yang positif sebanyak 5 (lima) sampel. hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan mengingat formalin merupakan bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan manusia karena bersifat karsinogenik Diharapkan Dinas yg terkait untuk segera bisa menindaklanjuti.

h. Pengujian Identifikasi Spesies

Pengujian Identifikasi Spesies dalam rangka monitoring dan Surveilans terhadap bahan pangan asal hewan dalam tahun anggaran 2013, target pemeriksaan dan pengujian adalah 250 sampel sedangkan realisasi pemeriksaan dan Identifikasi Spesies

Identifikasi Spesies adalah 205 sampel yang diambil dari 7 Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota. Hasil pengujian dari 205 sampel tersebut ternyata 1 sampel daging olahan dari Kota Salatiga positif mengandung daging babi, 1 sampel daging bakso dari propinsi Sumatera Selatan positif mengandung daging babi. Disarankan Dinas yg terkait untuk segera bisa menindaklanjuti untuk kehalalan dan kenyamanan bagi masyarakat konsumen muslim di wilayah tersebut.

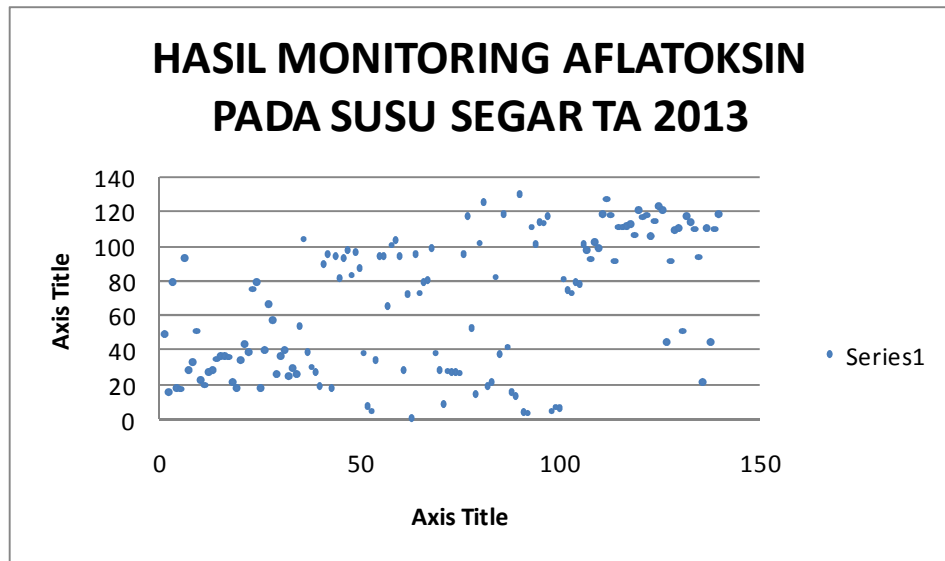
i. Pengujian Boraks

Pengujian Boraks dalam rangka Monitoring dan Surveilans terhadap bahan pangan asal hewan dalam tahun anggaran 2013, target pemeriksaan dan pengujian adalah 58 sampel sedangkan realisasi pemeriksaan dan pengujian Boraks adalah 78 sampel yang diambil dari 3 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota. Dari hasil pengujian 78 sampel tersebut masih ada 4 sampel yang mengandung Boraks yaitu sampel bakso sapi, bakso ayam dan dendeng sapi.

j. Aflatoxin

Pengujian Aflatoxin dalam rangka Monitoring dan Surveilans terhadap bahan pangan asal hewan dalam tahun anggaran 2013, target pemeriksaan dan pengujian adalah 100 sampel sedangkan realisasi pemeriksaan dan pengujian Aflatoxin adalah 140 sampel yang diambil dari 5 Kabupaten/Kota.

Grafik 8. Hasil Monitoring Aflatoksin pada Susu Segar TA. 2013

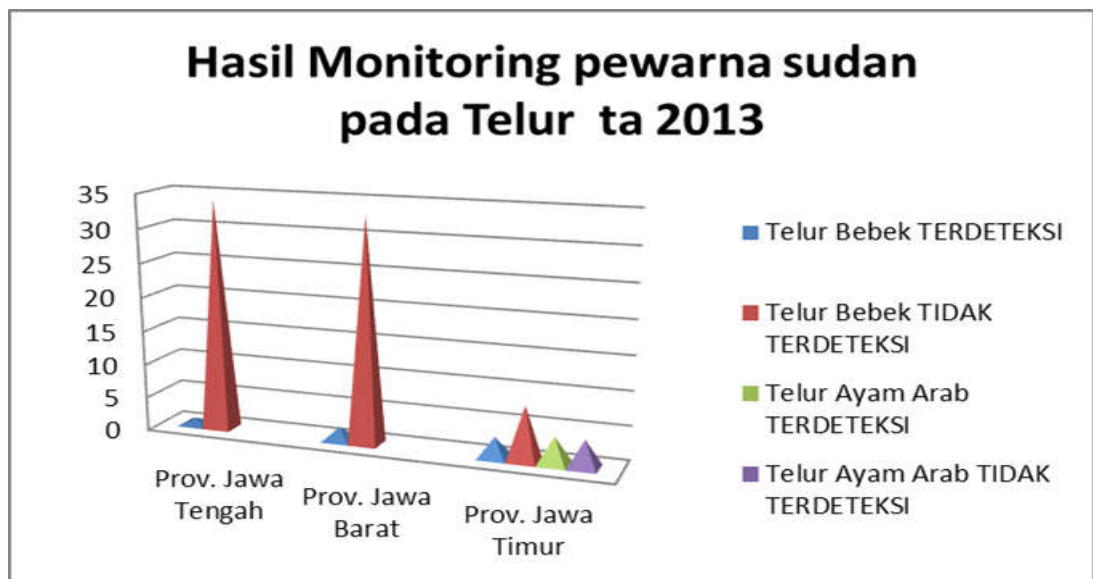


Dari hasil monitoring terlihat bahwa kandungan aflatosin dalam susu segar masih jauh dibawah batas maksimum yang diperbolehkan.

k. Pengujian Pewarna Sudan

Pengujian pewarna sudan dalam rangka monitoring dan Survailans terhadap bahan pangan asal hewan dalam tahun anggaran 2013,sebanyak 86 sampel. Sedangkan sebanyak 1 sampel dari pengguna jasa yang diuji di BPMSPH.

Grafik 9. Hasil Monitoring Pewarna Sudan pada Telur TA. 2013.



Dari hasil pengujian dari 86 sampel tersebut terdapat 6 sampel telur bebek dan 4 telur ayam arab yang mengandung pewarna sudan. Satu sampel ditemukan di provinsi Jawa Tengah, 2 sampel di provinsi Jawa Barat dan 3 sampel dari provinsi Jawa Timur. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan mengingat potensi telur bebek yang diekspor ke beberapa negara tetangga. Dan ada 1 sampel yang dikirim dari beberapa pengguna jasa/ konsumen BPMSPH yang diuji terhadap bahan pewarna Sudan.

I. Logam Berat

Pengujian Logam berat dilaksanakan terhadap logam Pb, Cd, Cu, Fe, Hg, As, Zn dan Mg. Pengujian Logam Berat dalam rangka Monitoring dan Surveilans terhadap bahan pangan asal hewan dalam tahun anggaran 2013 dengan target pemeriksaan dan pengujian sebanyak 150 sampel. Realisasi pemeriksaan dan pengujian logam berat adalah 140 sampel. Dari hasil pengujian dari 140 sampel tersebut masih ada 45 sampel yang terdeteksi mengandung logam Pb, 38 sampel mengandung logam Cadmium, dan 6 sampel terdeteksi mengandung logam Hg. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan karena logam tersebut merupakan bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan manusia karena bersifat karsinogenic. Dan ada 43 sampel yang dikirim dari beberapa pengguna jasa/ konsumen BPMSPH yang diuji terhadap logam berat.

m. Proksimat

Pengujian proksimat dalam rangka monitoring dan Surveilans terhadap bahan pangan asal hewan dalam tahun anggaran 2013 sebanyak 3 sampel. Dan ada 54 sampel yang dikirim dari beberapa pengguna jasa/ konsumen BPMSPH yang diuji terhadap uji proksimat.

n. Nitrit

Pengujian nitrit dalam rangka Monitoring dan Surveilans terhadap bahan pangan asal hewan dalam tahun anggaran 2013 sebanyak 10 sampel. Dari hasil pengujian dari 10 sampel tersebut 6 sampel daging sapi olahan di Provinsi Sulawesi Utara, Propinsi Bengkulu, Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Tegal memiliki kandungan nitrit diatas 30 ppm. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan meskipun kandungan nitrit dlm bahan pangan tersebut masih dibawah standar yang diijinkan dalam bahan pangan.

o. Residu Anthelmintik

Pengujian residu Anthelmintik dalam rangka Monitoring dan Surveilans terhadap bahan pangan asal hewan dalam tahun anggaran 2013 sebanyak 30 sampel yang seluruhnya diambil dari provinsi DKI Jakarta. Dari hasil pengujian terhadap 30 sampel tersebut, 3 sampel terdeteksi mengandung LVM, 2 sampel terdeteksi mengandung Triabendazol (TBZ), 2 sampel terdeteksi mengandung MXD dan 2 sampel terdeteksi mengandung TCBZ. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan karena obat-obatan tersebut dapat menimbulkan resistensi dan dapat berbahaya untuk kesehatan manusia. Diharapkan Dinas yg terkait untuk segera bisa menindaklanjuti.

p. Uji Fisik/Kimiawi

Pengujian Fisik/Kimiawi pada tahun Anggaran 2013 ini dilakukan terhadap 40 sampel yang berasal dari unit usaha skala besar. Pengujian fisik/kimiawi ini meliputi uji warna, rasa, konsistensi, PH, index kelarutan, derajat keasaman, keutuhan, dan alcohol. Sedangkan khusus uji fisik pada telur yaitu pengujian kerabang, kondisi kantung udara, kondisi putih telur, kondisi kuning telur dan bau.

2. Bimbingan Teknis Laboratorium Daerah

Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium Daerah pada Tahun 2013 mencapai 22 Lab. di seluruh wilayah Indonesia. Materi bimbingan teknis tersebut sebagian besar adalah tentang sertifikasi laboratoriu, disamping metode pengujian. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Data Pelaksanaan Bimbingan Teknis Laboratorium Daerah Th. 2013

NO	Tempat	TOPIK/MATERI/BAHAN/KEGIATAN
1	LAB. PROVINSI YOGYAKARTA	Bimbingan teknis ISO 17025
2	LAB. TIPE B PROVINSI PAPUA	Bimbingan teknis ISO 17025
3	LAB PROVINSI ACEH	Bimbingan teknis uji sederhana formalin, boraks.
4	LAB KOTA BALIKPAPAN	Bimbingan teknis ISO 17025
5	LAB PROVINSI SUMATERA BARAT	Bimbingan teknis pengujian cemaran mikroba
6	LAB. PROVINSI SULAWESI TENGAH	Bimbingan teknis ISO 17025
7	LAB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Bimbingan teknis ISO 17025
8	BPKH DAN KESMAVET CIKOLE PROV. JABAR	Bimbingan teknis ISO 17026
9	LAB. PROVINSI BANTEN	Bimbingan teknis ISO 17025
10	LAB. PROVINSI SULAWESI UTARA	Bimbingan teknis ISO 17025
11	LAB. BANGKA BELITUNG	Bimbingan teknis ISO 17025
12	LAB. PROVINSI BALI	Bimbingan teknis ISO 17025
13	BPKH DAN KESMAVET CIKOLE PROV. JABAR	Bimbingan teknis validasi metode pengujian cemaran mikroba dan kimia
14	LAB. PROVINSI SUMATERA BARAT	Bimbingan teknis pengujian identifikasi spesies
15	LAB. PROV JATIM MALANG	Bimbingan teknis ISO 17025
16	BV SUBANG	Bimbingan teknis Info lab
17	LAB. PROVINSI BANTEN	Bimbingan teknis PPC dan Peranan laboratorium kesmavet dalam pengawasan PAH
18	SUMATERA BARAT	Bimbingan teknis ISO 17025

19	LAMPUNG	Bimbingan teknis pengujian identifikasi spesies
20	NTT	Bimbingan teknis ISO 17025
21	MALANG	Bimbingan teknis ISO 17025
22	JAWA BARAT	Bimbingan teknis pengujian identifikasi spesies

3. Pengembangan Teknis dan Metode Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Produk Peternakan

Pengembangan teknis Metode pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan yang dilaksanakan oleh BPMSPH dalam tahun anggaran 2013 dari yang ditargetkan 5 metode, terealisasi 6 metode baru meliputi :

1. Pengembangan metoda untuk Pengujian Cemar Mikroba yaitu *Listeria monocytogenes*, *Clostridium prefrigenes*.
2. Pengembangan metoda untuk Pengujian Residu Obat yaitu : pengujian residu nitrofurantoin dan quinolone pada susu segar.
3. Pengembangan metoda untuk Pengujian Residu Pestisida yaitu : Diazinon, Profenofos.

4. Sertifikasi Pengujian Mutu Produk Peternakan

Selama Tahun 2013, telah diterbitkan sertifikat hasil pengujian pada 4076 sampel sebanyak 732 sertifikat. Dimana di dalam satu sertifikat terdapat hasil pengujian 1 atau lebih sampel yang diuji berdasarkan pengguna jasa baik instansi pemerintah, maupun pihak swasta. Upaya Pengembangan pelayanan terhadap pengguna jasa/pengguna jasa pengujian laboratorium meliputi :

1. Melakukan komunikasi dengan pengguna jasa/pengguna jasa pengujian untuk memperoleh umpan balik yang positif maupun negatif dengan memberikan kuisioner, untuk penyempurnaan, peningkatan mutu pelayanan kepada pengguna jasa.
2. Memberikan akses kepada pengguna jasa dalam membantu unjuk kerja laboratorium yang berhubungan dengan pengujian

sampel dari pengguna jasa tersebut, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi pengguna jasa lain.

3. Menginformasikan kepada pengguna jasa mengenai terjadinya keterlambatan hasil dan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengujian secara cepat, misalnya adanya perubahan metoda pengujian yang digunakan laboratorium dari metoda yang diminta oleh pengguna jasa.
4. Menyampaikan/memberitahukan laporan hasil uji secepat mungkin melalui media elektronik seperti telepon, faksimile dan media lainnya.

5. Penyerapan Anggaran

Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor : Nomor : DIPA-018.06.2.567275/2013, tanggal 05 Desember 2012, dengan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (018.06.09) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.204.249.000,- , yaitu Kegiatannya Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (1786), dengan anggaran sebesar Rp. 15.204.249.000,- Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 13.276.716.216,- atau 87.32 %. Sisa anggaran tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.927.532.784,- atau 12.68 %. Secara rinci realisasi data keuangan yang dikelola balai dalam tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Keuangan yang dikelola BPMSPH pada Tahun anggaran 2013.

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (018.06.09)

No.	Tolok Ukur	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa dana (Rp.)	Realisasi (%)
I.	Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (1786),	15.204.249.000,-	13.276.716.216,-	1.927.532.784,-	87.32
1.	Pengujian Mutu Produk Peternakan	3.253.516.000,-	2.560.112.565,-	693.403.435,-	78.69
2.	Fasilitasi Peralatan Laboratorium Kesamvet	170.547.000,-	170.500.000,-	47.000,-	99.97
2.	Koordinasi Teknis	785.405.000,-	733.962.420,-	51.442.580,-	93.45
4.	Fasilitas PNB	148.988.000,-	81.010.000,-	67.978.000,-	54.37
	Penguatan UPT Pengujian Mutu Produk Peternakan	653.190.000,-	562.496.025,-	90.693.975,-	86.11
5.	Layanan Perkantoran	4.073.585.000,-	3.590.115.706,-	483.469.294,-	88.13
6.	Kendaraan Bermotor	251.570.000,-	251.570.000,-	-	100.00
7.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	174.083.000,-	174.083.000,-	-	100.00
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	291.000.000,-	291.000.000,-	-	100.00
8.	Gedung dan Bangunan	5.402.365.000,-	4.861.866.500,-	540.498.500,-	90.00
	JUMLAH	15.204.249.000,-	13.276.716.216,-	1.927.532.784,-	87.32

E. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

Dalam melaksanakan tupoksi balai, ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai rencana. Hal ini disebabkan bukan karena tidak mampu melaksanakan kegiatan tersebut, melainkan ada beberapa kendala sebagai berikut :

1. Masih kurangnya peraturan - peraturan / perangkat lunak yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan seperti:
 - a. Pedoman pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
 - b. Kewajiban produsen/eksportir/importir/ rumah makan yang bahan baku utamanya berasal dari produk hewan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan;
2. Adanya permintaan pengujian yang belum dapat dilaksanakan sehubungan dengan sarana pengujian (peralatan laboratorium) yang belum lengkap.
3. Adanya beberapa permintaan pengujian yang diluar tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada terutama sarana fisik (Gedung dan Peralatan Laboratorium).
5. Sedikitnya informasi rencana export produk bahan pangan asal hewan dalam rangka pengujian mutu produk hewan sebagai persyaratan yang harus ditempuh.
6. Banyaknya bahan – bahan pengujian yang harus diimpor dan terbatasnya anggaran dalam pengadaan bahan kimia, biologik, gelas dan bahan penunjang lainnya yang mengakibatkan adanya permintaan pemeriksaan dan pengujian yang tidak bisa dikerjakan sehingga mengurangi pelayanan terhadap pengguna jasa.
7. Pengadaan bahan kimia (B3), Biologik, standar kuman. Akhir-akhir ini proses pengadaan bahan kimia, biologik dan bahan standar sering terlambat dikarenakan tertahan di Bea Cukai. Selain itu dengan adanya peraturan yang terkait dengan bioterorisme maka dalam pengadaan bahan kimia, biologik dan standar prosedur tambahan sehingga mempersulit dan memperlambat proses pengadaan bahan.

8. Perbedaan tarif/biaya pengujian yang diberlakukan di laboratorium-laboratorium lingkup KEMENTAN untuk jenis pengujian yang sama menimbulkan pertanyaan dari masyarakat pengguna jasa laboratorium.
9. Belum adanya data dan jumlah peternak dan produsen yang ada di setiap Kabupaten/Kota yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun rencana monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan.
10. Belum lengkapnya data *Nomor Control Veteriner* (NKV) dari setiap Provinsi, Kabupaten/Kota.
11. Ruangan staf sudah tidak mencukupi

F. Strategi Pemecahan Masalah

Sesuai Renja Balai BPMSPH dimana faktor-faktor keberhasilan yang harus mendapat perhatian dalam mengatasi permasalahan diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan teknik dan metode, standard operasional prosedur dan penerapan sistem mutu dan system informasi laboratorium;
- b. Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan;
- c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia secara bertahap melalui pendidikan dan atau pelatihan baik didalam maupun diluar negeri;
- d. Memantapkan landasan operasional balai, pedoman dan tata cara pengujian mutu produk hewan melalui Peraturan Menteri Pertanian;
- e. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
- f. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui jejaring kerja laboratorium
- g. Menyeragamkan standar harga (tarif uji) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai keluar Peraturan Pemerintah

- h. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
- i. Pembenahan ruangan untuk ruang kerja staf.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat dimungkinkan adanya berbagai variasi dalam penyajian, akan tetapi yang terpenting adalah LAKIP tersebut memenuhi sebagai media Akuntabilitas secara umum dan secara khusus memenuhi sebagai media Akuntabilitas Kinerja Balai.

Dari hasil Analisis Capaian kelompok indikator kinerja, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai lebih dari dan atau sama dengan 100 %, namun penyerapan anggaran masih belum optimal (87.32%). Hal ini menunjukkan masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan Balai. Disamping itu, dari hasil pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan masih banyak sampel yang mengandung residu dan cemaran di dalam produk peternakan yang beredar dipasar, sehingga produk peternakan tersebut apabila dikonsumsi oleh masyarakat/konsumen akan menimbulkan gangguan kesehatan.

Semoga penyajian LAKIP ini dapat memberikan informasi dan data yang akuntabel dan tentunya bermanfaat bagi semua pihak khususnya Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.